

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Kabupaten Natuna pada triwulan I dipengaruhi oleh faktor angin musim utara yang masih berlangsung hingga bulan Februari dan pada bulan Maret terjadi lonjakan harga dikarenakan faktor HBKN yaitu masuknya bulan Suci Ramadhan. Terjadi kenaikan harga di beberapa komoditi pada triwulan I, yaitu : gula, tepung terigu, telur ayam ras, bawang merah jawa dan minyak goreng. Berikut daftar rata-rata harga bahan pokok pada triwulan I:

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	Perubahan Harga (%)
1	Beras	15,000	14,333	14,333	- 0.05
2	Gula	16,133	17,857	18,000	0.10
3	Minyak Goreng	17,200	17,400	17,400	0.01
4	Tepung Terigu	12,800	13,929	13,929	0.08
5	Daging	130,000	130,000	130,000	-
6	Telur Ayam Ras	52,000	55,786	60,786	0.14
7	Cabe Merah	88,846	86,538	85,923	- 0.03
8	Bawang Merah Jawa	37,667	41,143	40,643	0.07
9	Kacang Kedelai	18,600	15,571	15,571	- 0.19

Bupati Natuna selaku Ketua TPID Kabupaten Natuna mendorong anggota TPID khususnya OPD untuk memperkuat dan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui sinergi dan inovasi pada pilar 4K TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal ini seiring dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Natuna No: 500/EKON-SDA/67/2024 tentang Pengawasan Ketersediaan dan Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445H

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna Bukan Daerah Penghasil.

Kabupaten Natuna bukanlah Daerah Produsen atau penghasil barang kebutuhan pokok, hampir semua bahan kebutuhan pokok Pemerintah Kabupaten Natuna berasal dari luar daerah Kabupaten Natuna yaitu dari Tanjungpinang, Pontianak, Batam dan Jakarta.

2. Angin Musim Utara

Faktor Cuaca Ekstrem yaitu Musim Utara yang terjadi setiap tahunnya sehingga menjadi hambatan dalam kelancaran pendistribusian barang. Cuaca Ekstrem musim utara ini berlangsung dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan Februari yang menyebabkan angin kencang dan ombak tinggi. Sehingga terganggunya aktivitas

pelayaran dan aktivitas penangkapan ikan.

3. Kapasitas penyimpanan

Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa gudang di setiap Kecamatan di Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kendala ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan dalam pendistribusian barang dari daerah asal akibat jangka waktu pengiriman yang lama ataupun karena faktor cuaca.

4. HBKN

Seiring dengan HBKN Bulan Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret mendorong kebutuhan masyarakat semakin tinggi

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rapat koordinasi rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Natuna setiap Bulannya.
2. Pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok rutin satu bulan sekali oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.
3. Pengawasan persediaan bahan kebutuhan pokok rutin satu bulan sekali oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.
4. Pengumpulan informasi dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting di setiap Kecamatan di Kabupaten Natuna oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Natuna.
5. Mengadakan Bazar Pangan Murah menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2024 dan 24 Maret 2024
6. Melakukan koordinasi untuk menambah armada kapal laut yang akan masuk atau bersandar dipelabuhan Natuna yaitu KML. Malahayati

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun belum maksimal. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah.
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.
3. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.
4. Koordinasi dengan maskapai penerbangan agar mau masuk ke Kabupaten Natuna perlu terus dilakukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna, maka merekomendasikan beberapa kebijakan Pengendalian Inflasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat sistem logistik khususnya Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah terluar.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan dan Petani untuk meningkatkan hasil perikanan dan pertanian, sehingga Natuna bisa menjadi daerah penghasil.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat agar meninjau kembali tarif angkutan udara di Kabupaten Natuna, dimana tarif angkutan udara masih cenderung tinggi hingga mencapai Rp. 2.687.000 untuk sekali penerbangan dari Natuna menuju Batam.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dapat merekomendasikan penambahan maskapai atau menambah rute penerbangan dari dan keluar Natuna. Dimana hanya terdapat 2 maskapai yaitu Wings Air dan Nam Air. Sedangkan untuk rute penerbangan hanya Batam-Natuna dan Natuna Batam.